



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL Banjarmasin
2025

KPKNL BANJARMASIN



KPKNL BANJARMASIN

KANWIL DJKN PROVINSI KALSETENG

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan Pramuka No.7 – 70249

Telepon : (0511) 4281286

Faksimile : (0511) 4281261

Laman : www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin

Pos-El : kpknlbanjarmasin@kemenkeu.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	III
KATA PENGANTAR.....	V
RINGKASAN EKSEKUTIF	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin	2
C. Mandat dan Peran Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin ..	5
1. Pengelolaan kekayaan negara	5
2. Penilaian.....	6
3. Pengurusan Piutang Negara.....	6
4. Pelayanan Lelang	6
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pembiayaan APBN.....	6
D. Permasalahan Utama dan Program Reformasi Birokrasi	7
E. Sistematika Laporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Penetapan Kinerja 2025	13
Sasaran Strategis 1	15
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya.....	15
Sasaran Strategis 2.....	15
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.....	15
Sasaran Strategis 3.....	15
Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	15
Sasaran Strategis 4.....	15
Penerapan tata kelola aset yang efektif	15
Sasaran Strategis 5.....	16
Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	16
Sasaran Strategis 6.....	16
Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	16
Sasaran Strategis 7	16
Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	16

Sasaran Strategis 8.....	16
Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.....	16
C. Penyusunan Pengukuran Kinerja.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Agenda Prioritas dan Analisis Kinerja	21
1. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	23
2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.....	26
3. Sasaran Strategis 3: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa.....	29
4. Sasaran Strategis 4: Penerapan tata Kelola aset yang efektif	31
5. Sasaran Strategis 5: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan lelang yang professional dan produktif.....	32
6. Sasaran Strategis 6: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif.....	35
7. Sasaran Strategis 7: Penanganan Hukum dan komunikasi publik yang efektif.....	38
8. Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	40
C. Realisasi Anggaran.....	41
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
E. Kinerja Lain – Lain	42
F. Penghargaan.....	43
BAB IV PENUTUP	47
A. Simpulan Umum	47
B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang	48
LAMPIRAN.....	49

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan bimbingan-Nya, KPKNL Banjarmasin dapat terus menerus meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan penilaian dan pelayanan lelang kepada *stakeholder* dan masyarakat pengguna layanan.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan atau sasaran strategis DJKN pada tingkat KPKNL Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja ini sekaligus menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja KPKNL Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan pelayanan lelang kepada *stakeholder* dan masyarakat pengguna layanan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta nota dinas dari Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor ND-52/WKN.12/2024 tanggal 8 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024. Laporan Kinerja ini dapat berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja KPKNL Banjarmasin secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perwujudan *good governance*.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja KPKNL Banjarmasin Tahun 2025 ini dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong kinerja kami selaku pengelola aset negara dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan negara yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Kepala KPKNL Banjarmasin



Ditandatangani secara elektronik
Fatchur Berlianto



RINGKASAN EKSEKUTIF

Memasuki Tahun 2025 yang merupakan tahun prestasi KPKNL Banjarmasin, yang berbagai macam penghargaan dari pihak Eksternal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara khususnya dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Banjarmasin berupa penghargaan Terbaik Ketiga Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Semester II 2024 kategori Satuan Kerja dengan Nilai UP KKP Kecil, kemudian penghargaan Terbaik Ketiga Akurasi Rencana Penarikan Dana Semester II Tahun 2024 kategori Satuan Kerja dengan Pagu Kecil serta penghargaan Terbaik Ketiga Kuasa Pengguna Anggaran Semester II Tahun 2024 kategori Satuan Kerja dengan Pagu Kecil. Hal tersebut menuntut seluruh pegawai untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi dan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan. Penyesuaian proses bisnis dirumuskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal serta melindungi pegawai dan *stakeholder* dalam keadaan *new normal*. Dengan semangat yang tinggi dengan tetap menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan, KPKNL Banjarmasin mampu mencapai berbagai prestasi yang membanggakan. Pada tahun 2025, KPKNI Banjarmasin juga memperoleh penghargaan dari Kabupaten Banjar berupa Peringkat I atas Kepatuhan dan Ketaatan Membayar Pajak BPHTB Kabupaten Banjar Tahun 2024

Selain itu pada tahun 2025, KPKNL Banjarmasin berupaya menyelesaikan IKU yang sudah ditetapkan, KPKNL Banjarmasin yang ditunjukkan dengan perolehan prestasi Berupa Pencapaian Persentase Kontribusi Kekayaan Negara Terhadap Perekonomian dalam bentuk PNBPN sebesar 128,62% selama Tahun 2024. KPKNL Banjarmasin juga berkontribusi dalam Evaluasi Kinerja BMN Tertinggi dengan perolehan 134,05%. Dalam rangka pelaksanaan lelang, KPKNL Banjarmasin memperoleh penghargaan Persentase Pokok Lelang Tertinggi selama Tahun 2024 sebesar 126,38%. Berbagai prestasi tersebut diatas, memberikan capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 sebesar 116.69. Perolehan penghargaan KPKNL Banjarmasin juga turut mendukung Pemerintah dengan berperan aktif dalam pemulihan ekonomi nasional dengan mendukung UMKM yang ada di Kalimantan Selatan untuk mengikuti Lelang UMKM serta menyukseskan serta mempercepat proses pemanfaatan sewa BMN bagi UMKM.

Selanjutnya sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan atau sasaran strategis DJKN pada Tahun Anggaran 2025 dan sebagai alat untuk menilai kinerja KPKNL Banjarmasin secara kuantitatif, akuntabilitas, dan transparansi dalam rangka perwujudan *good governance*, KPKNL Banjarmasin menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Nota Dinas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-4486/KN.1/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 dan Nota Dinas dari Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor: ND-121/WKN.12/2026 tanggal 29 Januari 2026 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025.

Selama tahun 2025, KPKNL Banjarmasin telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam peta strategis DJKN Tahun 2025 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja KPKNL Banjarmasin Tahun 2025 yang terdiri dari 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sebanyak 19 Indikator Kinerja Individu (IKI). Berdasarkan laporan capaian kinerja tahun 2025, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Banjarmasin sebesar 112,08%. Nilai tersebut merupakan hasil penjumlahan capaian 4 perspektif dalam Balanced Scorecard Kementerian Keuangan yaitu Perspektif Stakeholder dengan capaian kinerja 33,18% (Bobot 30%), Perspektif Customer dengan capaian kinerja 23,85% (bobot 20%), Perspektif Internal Proses dengan capaian kinerja 30% (bobot 25%), dan Perspektif Learning and Growth dengan capaian kinerja 29,66% (bobot 25%). Pencapaian tersebut merupakan bentuk komitmen KPKNL Banjarmasin dalam melayani stakeholder.

Kinerja KPKNL Banjarmasin tentunya tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia yang berkualitas pada internal organisasi. Untuk mendukung peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia tersebut, KPKNL Banjarmasin terus mendorong pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang berkaitan dengan tugas dan fungsi maupun non tugas. KPKNL Banjarmasin juga memberikan ruang kepada Stakeholder untuk berdialog dan berdiskusi terkait tugas dan fungsi KPKNL Banjarmasin melalui kegiatan Pagi Ceria yang dilaksanakan setiap Selasa pagi melalui media daring (online).

Sebagai penutup, saya Kepala KPKNL Banjarmasin menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan seluruh stakeholder maupun masyarakat pengguna layanan. Saya juga mengapresiasi upaya terbaik semua pegawai yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja KPKNL Banjarmasin yang tercermin dalam Laporan Kinerja 2025 ini. Selain memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPKNL Banjarmasin tahun 2025, kami harap Laporan Kinerja ini dapat menjadi tolak ukur kegiatan di masa depan. Kiranya Allah Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Dalam setiap race, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025
- E. Sistemanka

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KPKNL Banjarmasin merupakan instansi vertikal di lingkungan DJKN, Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sebagai instansi vertikal, KPKNL Banjarmasin dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin

1) Tugas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

2) Fungsi KPKNL

- a) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b) registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c) pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara; pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- d) pelaksanaan pelayanan penilaian;
- e) pelaksanaan pelayanan lelang;
- f) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- g) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- h) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan pelaksanaan administrasi KPKNL.

3) Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi KPKNL, terdapat subbagian, seksi serta jabatan fungsional yang memiliki tanggungjawab berbeda-beda. Struktur organisasi pada KPKNL Banjarmasin terdiri atas :

a) Subbagian Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.

b) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara.

c) Seksi Piutang Negara

Mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

d) Seksi Hukum dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

e) Seksi Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

f) Jabatan Fungsional Pelelang

Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela.

g) Jabatan Fungsional Penilai

Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/ atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.



Gambar 1. Struktur Organisasi KPKNL Banjarmasin

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Banjarmasin didukung oleh sumber daya manusia dalam berbagai bidang dan keahlian. Jumlah pegawai KPKNL Banjarmasin adalah sebanyak 36 pegawai dengan komposisi pegawai sebagai berikut:

I. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1. Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
D I/SMA	5
D III	6
D IV/ S I	20
S II	5
TOTAL	36

II. Berdasarkan Usia

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Tingkat Kelompok Usia	Jumlah Pegawai
21 – 30	9
31 – 40	11
41 – 50	11
➤ 50	5
TOTAL	36

III. Tenaga Fungsional

Tabel 3. Jumlah Tenaga Fungsional KPKNL Banjarmasin

Tingkat Eselon	Jumlah Pegawai
III	1
IV	5
Jabatan Fungsional Pelelang	5
Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah	5

IV. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4. Jumlah Tenaga Fungsional KPKNL Banjarmasin

Tingkat Kelompok Usia	Jumlah Pegawai
Laki-laki	26
Wanita	10
TOTAL	36x

C. Mandat dan Peran Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Banjarmasin memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Banjarmasin memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna kekayaan negara terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara dan pembinaan serta penatausahaan kekayaan negara. Sebagai aset manager, KPKNL Banjarmasin mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal, dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Banjarmasin sebagai kantor operasional di daerah yang melayani langsung satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Banjarmasin dengan memberikan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara antara lain penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan, persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan, pemindahtanganan BMN, Pemanfaatan BMN, inventarisasi dan sertifikasi.

2. Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi. Hasil penilaian kekayaan negara antara lain digunakan untuk penyusunan rencana pemerintah pusat, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, penerbitan SBSN, dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil, penilaian juga dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Highest and Best Use.

3. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara merupakan pelayanan yang diberikan kepada instansi/badan/lembaga negara yang memiliki piutang yang telah jatuh tempo dan dinyatakan macet sehingga sulit tertagih setelah dilakukan upaya penagihan. Piutang yang macet yang sulit tertagih tersebut dapat diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang pengurusannya diselenggarakan oleh KPKNL sebagai upaya penyelamatan keuangan negara sekaligus upaya penegakan hukum (Law enforcement) dalam masyarakat.

4. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Lelang juga merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum. Dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang yang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai akta dan transport untuk kepentingan peralihan hak.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pembiayaan APBN

Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berupa Biaya Administrasi (biad) pengurusan piutang negara dan bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sesuai

dengan Standard Operating Procedure yang berlaku. Selain itu, dari hasil pemanfaatan BMN juga termasuk dalam PNBPN yang disetor oleh Kementerian/Lembaga yang asetnya dimanfaatkan.

D. Permasalahan Utama dan Program Reformasi Birokrasi

Pada pelaksanaan kegiatan, secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2025 telah sesuai dengan yang ditargetkan dan banyak diantaranya mencapai nilai di atas 100%. Meski semua sasaran strategis mencapai target, namun terdapat beberapa persoalan/permasalahan utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dimaksud antara lain:

1. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat oleh Pemerintah mengakibatkan kegiatan *survey asset* yang masuk target portofolio aset belum bisa dilaksanakan 100%;
2. Perlunya peningkatan pengetahuan dan kompetensi pada satuan kerja terkait pengisian form pendataan portofolio aset untuk meminimalisir kesalahan pada saat pengisian form pendataan;
3. Peningkatan pemahaman pada satuan kerja untuk melakukan penginputan tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset;
4. Beberapa Debitur tidak ditemukan keberadaannya sehingga menjadi kendala dalam penerbitan surat keterangan tidak mampu;
5. Terdapat aset kredit yang diserahkan ke PUPN memiliki kualitas rendah dan nilai jaminan tidak mencukupi untuk menjamin hutang, aset kredit yang memiliki permasalahan hukum, dan aset yang dokumennya kurang lengkap, sehingga sulit untuk dicapai *recovery*-nya;
6. Daya beli masyarakat terhadap lelang menurun karena bencana *Covid-19*;
7. Persepsi masyarakat terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang dapat menghasilkan harga yang optimal belum merata di seluruh lapisan masyarakat serta masih banyak gugatan/perlawanan/keberatan terhadap pelaksanaan lelang hak tanggungan, fidusia dan kepailitan sebagai penyelesaian dari kredit macet.

Namun dimulai pada awal Tahun 2025 menjadi titik balik bagi KPKNL Banjarmasin untuk bertransformasi dari sekadar "penjaga" aset menjadi pengelola aset yang aktif dan modern. Mengusung semangat akselerasi, DJKN ingin memastikan setiap rupiah dan jengkal tanah milik negara memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat, selaras dengan visi Asta Cita pemerintah.

Berikut adalah penyederhanaan dari strategi besar DJKN di tahun 2025 yang dilaksanakan dan menjadi pedoman oleh KPKNL Banjarmasin dalam melaksanakan pelayanan dan penyelesaian target kinerja, sebagai berikut:

1. Menjadikan Aset Negara "Bekerja" untuk Rakyat

DJKN tidak ingin lagi aset negara hanya tercatat rapi di atas kertas (administratif). Fokusnya kini adalah Optimalisasi:

- Aset Harus Produktif: Aset-aset menganggur (seperti eks-BPPN) akan dikelola agar menghasilkan nilai ekonomi.
- Siaga Bencana: Memperkuat *Pooling Fund* Bencana, yaitu tabungan khusus agar negara selalu siap secara finansial saat terjadi musibah tanpa mengganggu pos anggaran lain.
- Standar Global: Memperluas jejaring internasional agar pengelolaan kekayaan kita setara dengan standar terbaik dunia.

2. Revolusi Digital: Data yang Bicara

Mengelola aset negara yang tersebar luas mustahil dilakukan secara manual. Kuncinya ada pada teknologi:

- Satu Data (Single Source of Truth): Memastikan tidak ada perbedaan data antar instansi. Data yang akurat menghasilkan keputusan yang tepat.
- SIMAN Makin Canggih: Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) terus dipoles agar pengelolaan aset bisa dipantau secara langsung (*real-time*) dan transparan.
- Budaya Inovasi: Ide-ide segar tidak hanya datang dari pusat, tapi juga dijaring dari kantor-kantor daerah (KPKNL/Kanwil) agar solusi yang diciptakan sesuai dengan masalah di lapangan.

3. Manusia sebagai Penggerak Perubahan

Teknologi hanya alat; mesin utamanya tetaplah Sumber Daya Manusia (SDM). DJKN fokus pada tiga hal:

- Agile & Techno-Savvy: Pegawai didorong untuk cepat beradaptasi dengan perubahan dan mahir menggunakan teknologi terkini.
- Integritas Harga Mati: Menjaga kepercayaan publik dengan komitmen bebas korupsi yang kuat di setiap lapisan.
- Menjadi Agen Perubahan: Pegawai tidak hanya bekerja rutinitas, tapi punya visi untuk membawa perubahan positif bagi institusi.

4. Fondasi Birokrasi yang Lincah

Untuk mendukung itu semua, DJKN melakukan perombakan internal pada tiga pilar:

- Struktur Organisasi: Dibuat lebih ramping dan fleksibel (tidak kaku/hirarkis).
- Proses Bisnis: Mengubah cara kerja lama yang berbelit-belit menjadi serba digital dan ringkas (*re-engineering*).
- Kualitas SDM: Menciptakan profesional yang berintegritas tinggi.

Singkatnya, KPKNL Banjarmasin di tahun 2025 ingin bergerak sebagai "Movement of Change". Bukan lagi birokrasi yang kaku dan lambat, melainkan sebuah gerakan yang gesit dalam mengamankan, mengelola, dan melipatgandakan nilai kekayaan negara demi kemakmuran nasional.

E. Sistematika Laporan

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya.

2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, Peran KPKNL Banjarmasin, dan sistematika laporan.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja yang tercantum dalam Penetapan Perjanjian Kinerja.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang meliputi analisis dan evaluasi kinerja KPKNL Banjarmasin dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Banjarmasin tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Banjarmasin di tahun yang akan datang.

Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

02. Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Rencana Tahun 2025 dan tahun 2026
- C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025
- D. Rehnement Kinerja dan Risiko Tahun 2025 dan Tahun 2026

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP- 245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. DJKN berusaha memberikan pelayanan di barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan

fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN mempunyai sasaran strategis yang ditetapkan. Sasaran strategis merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2020-2024, sasaran strategis DJKN yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat, ekonomi, sosial dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan public DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Untuk mewujudkan kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang best fit, pada tahun 2020-2024 KPKNL Banjarmasin akan mendukung dan melaksanakan kebijakan kelembagaan dari Kementerian Keuangan sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

B. Penetapan Kinerja 2025

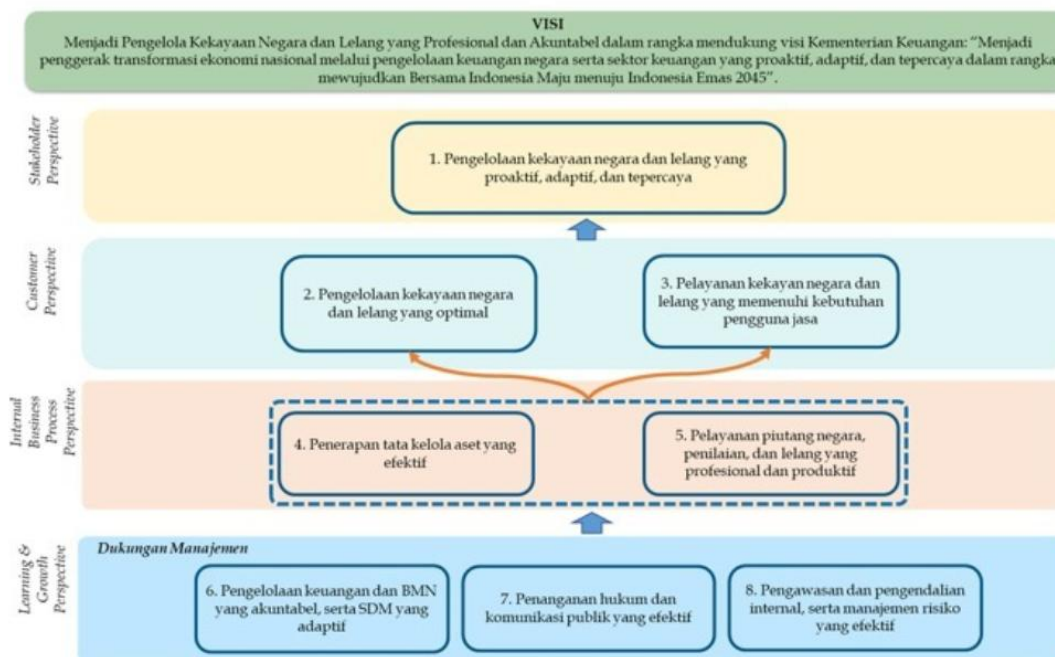
Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menerjemahkan strategi ke dalam suatu tindakan, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sejak awal 2008 Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan dikelola secara efektif dan efisien. BSC dipilih sebagai sistem manajemen strategis dan pengukuran kinerja Kementerian Keuangan karena beberapa faktor, antara lain :

1. mampu menerjemahkan strategi organisasi dalam suatu tindakan.
2. memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan memperhitungkan perspektif finansial dan nonfinansial, serta lingkungan internal maupun eksternal organisasi dan keadaan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang
3. memberikan umpan balik untuk peningkatan/perbaikan kinerja pada periode berjalan dan peningkatan/perbaikan kinerja di masa mendatang.
4. memiliki konsep sebab akibat dimana pencapaian kinerja diperoleh dari serangkaian proses dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran setrategis KPKNL Banjarmasin. Sasaran strategis KPKNL Banjarmasin telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Banjarmasin sesuai bagan berikut:

Peta Strategi



Gambar 2. Peta Strategi KPKNL Banjarmasin

Peta Strategi KPKNL Banjarmasin menerapkan 4 (empat) perspektif, yaitu: stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Stakeholder perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. Customer perspective berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Internal process perspective berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sementara learning and growth perspective berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan. Dari Peta Strategi KPKNL Tahun 2025 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis sebanyak 8 (delapan) dan IKU yang diidentifikasi sebanyak 19 (sembilan belas) IKU. Perjanjian Kinerja KPKNL Banjarmasin sebagaimana dokumen Sasaran Kinerja Pegawai antara Kepala KPKNL Banjarmasin dengan Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah berupa Perjanjian Kinerja Nomor PK- 03/WKN/2025 tanggal 31 Januari 2025.

Dokumen Perjanjian Kinerja sasaran strategis dan IKU Kepala KPKNL Banjarmasin dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 5. Sasaran Strategis KPKNL Banjarmasin

Sasaran Strategis 1**Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya**

Indikator Kinerja		Satuan	Target
1a-CP	Indeks integritas	Indeks	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	%	100 (Rp.31,6 M)

Sasaran Strategis 2**Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal**

Indikator Kinerja		Satuan	Target
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	%	100
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	%	100 (Rp.325,9 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	%	100 (Rp.2,1 M)

Sasaran Strategis 3**Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa**

Indikator Kinerja		Satuan	Target
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Indeks	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks	77

Sasaran Strategis 4**Penerapan tata kelola aset yang efektif**

Indikator Kinerja		Satuan	Target
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	%	100
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	%	100

Sasaran Strategis 5**Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif**

Indikator Kinerja		Satuan	Target
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	%	100
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	%	70
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	%	80

Sasaran Strategis 6**Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif**

Indikator Kinerja		Satuan	Target
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Indeks	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	80

Sasaran Strategis 7**Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif**

Indikator Kinerja		Satuan	Target
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Indeks	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Indeks	80

Sasaran Strategis 8**Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif**

Indikator Kinerja		Satuan	Target
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	Indeks	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	Indeks	100

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Banjarmasin memiliki DIPA 2025 dalam melaksanakan berbagai program dengan rincian :

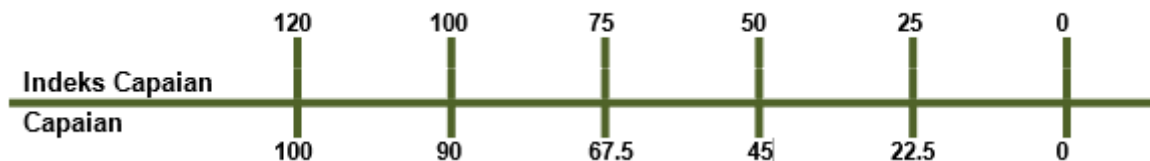
Program/ Kegiatan Tahun 2025		Anggaran
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp	564.301.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	84.584.000
2. Pengelolaan Aset	Rp	479.717.000
Program Dukungan Manajemen	Rp	3.718.429.000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp	21.100.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	3.648.523.000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	35.310.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	13.496.000
	Rp	4.282.730.000

Selanjutnya, pembahasan Akuntabilitas Kinerja dalam Bab III mengacu pada Capaian IKU, Evaluasi dan Analisis Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan.

C. Penyusunan Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja tahun 2024, KPKNL berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximiza* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.



Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

- b. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

- c. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki *Stabilize*

$$C_{n+1} - C_n$$

I_n = Indeks capaian
 I_{n-1} = Indeks capaian di bawahnya
 I_{n+1} = Indeks capaian di atasnya
 C_a = Capaian awal
 C_n = Realisasi/target x 100%
 C_n = Capaian dengan ketentuan:

- a. Apabila Realisasi > Target, maka:
 $C_n = 100 - (C_a - 100)$, di mana C_a maksimum adalah 200%
- b. Apabila Realisasi < Target, maka:
 $C_n = C_a$
 C_{n-1} = Capaian di bawahnya
 C_{n+1} = Capaian di atasnya

$$I = I + \frac{I_{n+1} - I_n}{C} \cdot C$$

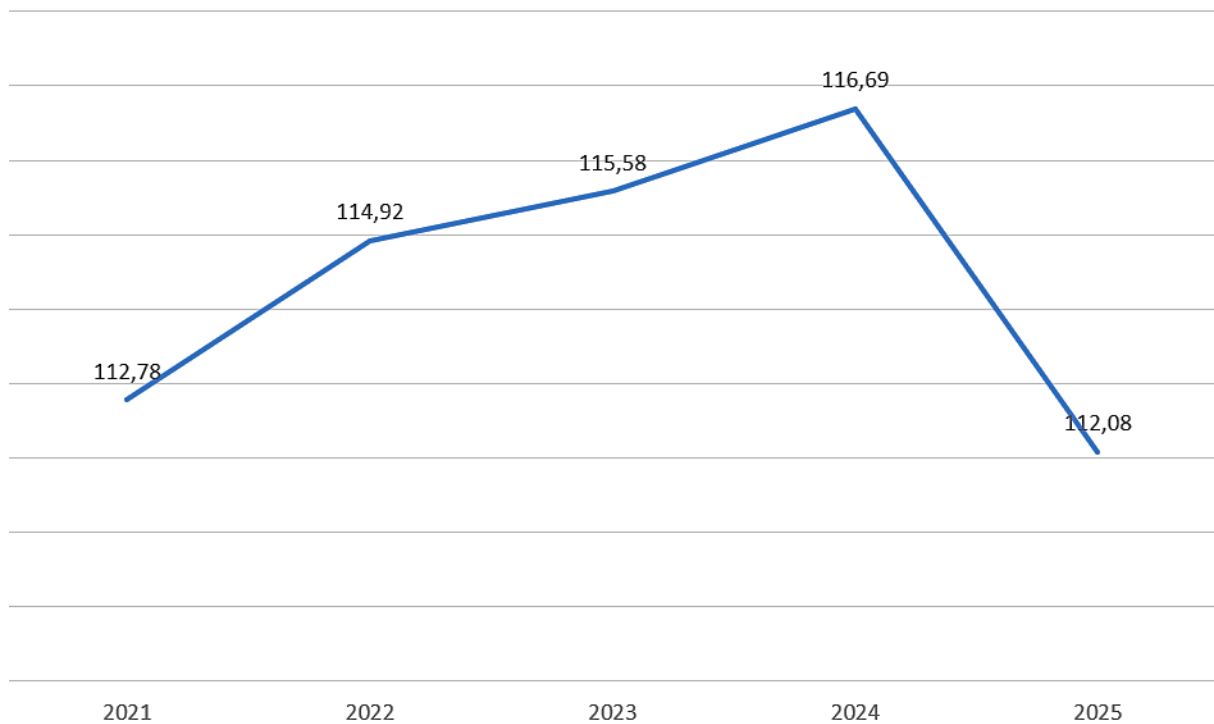
IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam lima tahun terakhir, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh KPKNL Banjarmasin menunjukkan hasil yang cukup stabil. Selama tahun 2021-2025, perolehan NKO rata-rata dalam lima tahun terakhir sebesar 112,08%. Hal ini menunjukkan, perolehan NKO KPKNL Banjarmasin selalu mendapat predikat “Istimewa” berdasar pada penetapan sebaran predikat kinerja. Hal ini terlihat dari grafik sebagaimana dibawah ini :



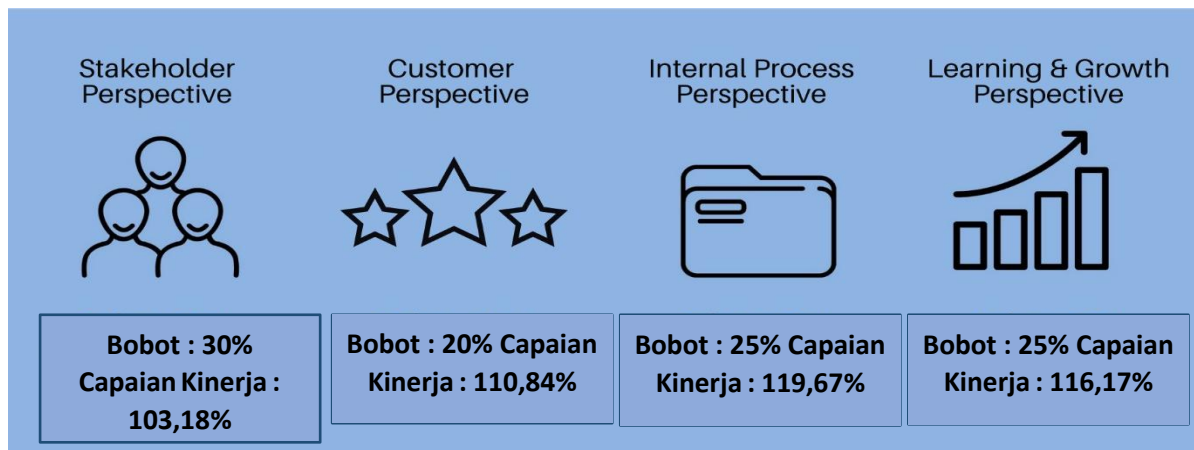
Akuntabilitas kinerja KPKNL Banjarmasin tahun 2025 dilakukan melalui evaluasi dan pengukuran pencapaian sasaran dan IKU. Pada tahun 2025, KPKNL Banjarmasin telah menetapkan delapan (delapan) sasaran strategis :

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Untuk mencapai 8 (delapan) Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2025 KPKNL Banjarmasin menetapkan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat pencapaian sasaran pada tahun 2025 sebesar 112,08%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing masing perspektif. Berikut penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis:

B. Realisasi Agenda Prioritas dan Analisis Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 19 (Sembilan belas) IKU Kemenkeu-*Three* Tahun 2025, diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-*Three* Tahun 2025 Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Banjarmasin **112,08%**.



Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target s.d	Realisasi s.d	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
Stakeholder Perspective (30%)											
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	-	-	Triwulan IV	Triwulan IV					103,15	103,15
1a-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100,00	105,29	19,00%	57,55%	105,29	105,29	60,62	
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100,00%	100,32%	14,00%	42,42%	100,32	100,32	42,56	
Customer Perspective (20%)											
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	-	-							101,67	101,67
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100,00%	120,90%	19,00%	36,54%	120,90	120,00	43,85	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100,00%	69,96%	19,00%	36,54%	69,96	69,96	25,56	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100,00%	119,54%	14,00%	26,92%	119,54	119,54	32,26	
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-	-							120,00	110,54
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74,00	94,94	14,00%	50,00%	125,30	120,00	60,00	
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/M	77,00	94,90	14,00%	50,00%	123,25	120,00	60,00	
Internal Process Perspective (25%)											
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-	-							120,00	120,00
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Max	P/M	100,00%	120,20%	14,00%	50,00%	120,20	120,00	60,00	
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100,00%	120,00%	14,00%	50,00%	120,00	120,00	60,00	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	-	-							119,33	119,67
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100%	115,00%	14,00%	33,33%	115,00	115,00	39,33	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%	105,02%	14,00%	33,33%	150,03	120,00	40,00	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80,00%	133,10%	14,00%	33,33%	166,37	120,00	40,00	
Learning and Growth Perspective (25%)											
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	-	-							116,67	116,17
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100,00	110,00	14,00%	33,33%	110,00	110,00	36,67	
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80,00%	95,00%	14,00%	33,33%	122,50	120,00	40,00	
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	-	-							116,63	116,17
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100,00	113,27	14,00%	50,00%	113,27	113,27	56,63	
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (FPID)	Max	P/M	80,00	122,75	14,00%	50,00%	153,44	120,00	60,00	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	-	-							115,20	115,20
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80,00	97,21	14,00%	50,00%	121,52	120,00	60,00	
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	Max	P/M	100,00	110,40	14,00%	50,00%	110,40	110,40	55,20	
NKO											112,08

1. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

Sasaran strategis ini menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara dengan prinsip akuntabilitas dalam mendukung visi Kementerian Keuangan. DJKN sebagai pengelolaan kekayaan negara dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah atas pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Banjarmasin mengidentifikasi 2 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

1) Kode 1a-CP Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam Laporan Kinerja KPKNL Banjarmasin Tahun 2025 melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d. Q4 tahun 2025. Adapun target indeks integritas KPKNL Banjarmasin pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 100 dengan realisasi sebesar 105,00 yang diperoleh dari perhitungan komponen penilaian hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dikurangi dengan komponen penilaian faktor koreksi (misal: keterjadian fraud, hasil audit investigasi, pengondisian, dsb.) ditambah komponen penilaian tindak lanjut SPI, tindak lanjut pengaduan, tindak lanjut hukdis, dan realisasi kegiatan pencegahan.

Langkah-langkah dalam pencapaian target IKU ini, antara lain:

- a. Menekankan kepada seluruh pejabat/pegawai untuk selalu menolak terhadap upaya pemberian gratifikasi.
- b. Melakukan sosialisasi tentang antikorupsi, tolak gratifikasi, dan penguatan integritas, baik kepada internal kantor maupun eksternal (stakeholder dan masyarakat).
- c. Terus menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam setiap pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari.
- d. Penguatan tiga lini sistem pengendalian intern, yakni Manajemen Operasional, Unit Kepatuhan Internal, dan Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan semua tugas dan fungsi, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari tindakan fraud.

Dalam mendukung capaian IKU, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan KPKNL

Banjarmasin meliputi :

- 1) Pelaksanaan kegiatan terkait kerangka integritas sesuai jadwal dan arahan dari kantor pusat.
- 2) Pelaksanaan pemantauan pengendalian utama, pemantauan kode etik dan perilaku serta pemantauan pengaduan masyarakat.
- 3) Pelaksanaan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dilingkup KPKNL Banjarmasin;
- 4) Pembuatan pakta integritas untuk perjalanan dinas.

Tabel 6.IKU Kode 1a-CP Indeks Integritas

K-Three	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	100	100	100	117	120	120	120	
Capaian	100	100	100	117	120	120	120	

- 2) Kode 1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang diperoleh dari nominal capaian PNBPN Aset yang merupakan hasil penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN yang dikelola oleh KPKNL dan sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/ Lembaga (K/L) bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan ditambah PNBPN piutang negara yang merupakan nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL ditambah PNBPN lelang yang merupakan nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa bea lelang pembeli dan penjual, biaya permohonan lelang, uang jaminan pembeli wanprestasi, penerbitan kutipan risalah lelang pengganti kemudian dibandingkan dengan nominal target total PNBPN Aset ditambah PNBPN piutang negara dan PNBPN lelang.

Realisasi IKU persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang KPKNL Banjarmasin 2025 adalah sebesar Rp31.730.167.372,00 atau 100,32% yang diperoleh dari nominal realisasi PNBPN pengelolaan BMN sebesar Rp23.291.141.576,00 ditambah PNBPN piutang negara sebesar Rp28.179.324,00 dan PNBPN lelang sebesar Rp8.410.846.872,00 sedangkan apabila dibandingkan dengan jumlah nominal target yang pada awal tahun sebesar Rp18.925.000.000,00 untuk PNBPN Ast BMN, untuk PNBPN piutang negara sebesar Rp.39.000.000,00 dan PNBPN lelang sebesar Rp.12.664.000.000,00.

Tantangan dan hambatan dalam pencapaian target, antara lain:

- Untuk pencapaian PNBPN pengelolaan Kekayaan Negara/BMN, satuan kerja (satker) belum sepenuhnya memahami dan memiliki kesadaran yang cukup tinggi mengenai pentingnya pengelolaan (pemanfaatan) BMN.
- Untuk pencapaian PNBPN piutang negara, sebagian besar Penanggung Utang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran utangnya yang disebabkan itikat baik PH kurang, BKPN tidak diduung barang jaminan dan hanya sebagian kecil Penanggung Utang yang melakukan pembayaran/angsuran.
- Untuk pencapaian PNBPN lelang, masih cukup banyak lelang yang Tidak Ada Peminat (TAP), terutama lelang eksekusi hak tanggungan

Langkah-langkah dalam pencapaian target IKU ini, antara lain:

- Melakukan bimbingan teknis pengelolaan kekayaan negara melalui sosialisasi, konsultasi, dan koordinasi yang lebih ditekankan untuk pemanfaatan BMN.
- Mengoptimalkan pemantauan secara periodik maupun insidental terkait wasdal.
- Melakukan penagihan langsung/melalui surat, baik kepada Penanggung Utang/Penjamin Utang untuk penyelesaian piutang negara.
- Melakukan monitoring dan mengawal khusus Penanggung Utang yang melakukan pembayaran/angsuran secara rutin.
- Melakukan koordinasi dengan para pemohon lelang untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial untuk laku dan nilainya cukup besar dan menetapkan nilai limit lelang secara bertahap sampai ke nilai likuidasi.
- Melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholder dengan objek lelang yang potensial laku, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Kejaksaan, lelang BMN dan BMD, serta lelang sukarela (termasuk lelang produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM).
- Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan pemasaran objek lelang.
- Meningkatkan publikasi lelang melalui e-Auction, media koran, media sosial, dan laman resmi KPKNL Banjarmasin.

Tabel 7. IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

K-Three	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1b-CP Presentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	135%	112%	112%	105%	99%	110%	100,32%	
Capaian	120%	112%	112%	105%	99%	110%	100,32%	

Selanjutnya, dapat kami sampaikan terkait raw data capaian atas realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebagai berikut:

Tabel 8. Raw Data Target dan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
PNBP Aset	18,925,000,000	23.291.141.576,00	123,07%
PNBP Lelang	12.664.000.000,00	8.410.846.472,00	66,41%
PNBP PN	39.000.000,00	28.179.324,00	72.25%
Total PNBP	85.917.460.000,00	103.128.093.347,00	120,03%

2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Berdasarkan Bagian Kedelapan Pasal 32, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam lingkup pengelolaan kekayaan negara, DJKN turut berperan dalam melaksanakan pengelolaan piutang negara serta pelayanan lelang. Dalam sasaran ini, Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang optimal adalah pengelolaan piutang negara yang efektif mencakup proses identifikasi, penagihan, dan penyelesaian piutang. Selain itu layanan lelang diharapkan dapat mendorong peran penegakan hukum serta penguatan keuangan negara melalui layanan lelang yang transparan, efektif, dan akuntabel. Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL mengidentifikasi 3 IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

3) Kode 2a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Pengelolaan aset yang optimal bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara dalam bentuk BMN dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan memiliki kepastian hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui perencanaan yang tepat dan pengelolaan yang strategis, aset negara dapat

berkontribusi secara maksimal dalam mendukung pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

IKU Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara dimaksudkan untuk mengukur peningkatan penggunaan BMN terhadap BMN yg terindikasi under utilized berdasarkan pengukuran SBSK pada periode sebelumnya. Adapun kriteria underutilized yang menjadi target yaitu BMN dengan tingkat kesesuaian SBSK di bawah 50%. Selanjutnya bentuk-bentuk peningkatan penggunaan BMN adalah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi penggunaan aset, yaitu utilisasi aset dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi (penggunaan sendiri, penggunaan bersama, dan penggunaan sementara);
- b) Optimalisasi pemanfaatan aset, yaitu utilisasi oleh pihak ketiga (pemerintah atau swasta, seperti: sewa, pinjam pakai, dan bentuk pemanfaatan lainnya);

Adapun untuk indeks capaian IKU tahun 2025 adalah 120,90% dari 111 NUP BMN yang menjadi target, dengan rincian:

- a. Penggunaan sebanyak 166 optimalisasi
- b. Pemanfaatan sebanyak 70 optimalisasi

Adapun capaian IKU Optimalisasi pengelolaan aset negara adalah sebagai berikut:

Tabel 8. IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

K-Three	2.Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	283%	214%	214%	146%	146%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

4) Kode 2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase realisasi pokok lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I (Fungsional Pelelang) dan Pegadaian dalam periode tertentu. Pada

Awal tahun 2025 total target pokok lelang sebesar Rp325.993.456.000,00 terdiri dari target KPKNL/Pelelang dan Pegadaian. Dengan realisasi pokok lelang pada 2025 sebesar Rp.228.072.764.666,00 dengan rincian pokok lelang KPKNL/Pelelang sebesar Rp. 182.685.300.466,00 dan pokok lelang Pegadaian sebesar Rp. 45.387.464.200,00. Dengan persentase setara 69,96%

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini, antara lain

- Produktivitas lelang eksekusi yang rendah atau masih cukup banyak lelang yang Tidak Ada Peminat (TAP), terutama lelang eksekusi hak tanggungan. Langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan terus diupayakan ke depan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, antara lain adalah:
- Melakukan koordinasi dengan para pemohon lelang untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial untuk laku dan nilainya cukup besar dan menetapkan nilai limit lelang secara bertahap sampai ke nilai likuidasi.
- Melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholder dengan objek lelang yang potensial laku, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Kejaksaan, lelang BMN dan BMD, serta lelang sukarela (termasuk lelang produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM).
- Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan pemasaran objek lelang.
- Meningkatkan publikasi lelang melalui e-Auction, media koran, media sosial, dan laman resmi KPKNL Banjarmasin

Tabel 9. Persentase realisasi pokok lelang

K-Three	2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2b-CP Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	112%	68%	82%	68%	68%	69%	69%	
Capaian	112%	68%	82%	68%	68%	69%	69%	

5) Kode 2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

Persentase penurunan outstanding piutang negara menggambarkan aspek kinerja pengelolaan piutang negara dari penagihan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding Berkas Kasus Piutang Negara (nilai saldo piutang negara). Kriteria pengakuan capaian atas IKU persentase penurunan outstanding piutang negara, yaitu untuk seluruh Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang ada

pada aplikasi FocusPN, dengan komponen Piutang Negara Dapat Disetor (PNDS), Penarikan, Pengembalian, Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), dan Keringanan Utang. Adapun realisasi IKU persentase penurunan outstanding piutang negara KPKNL Banjarmasin tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.576.583.261,00 dari target sebesar Rp. 2.150.000.000, dengan persentase sebesar 119,84%.

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini, antara lain adalah:

- Sebagian besar Penanggung Utang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran utangnya dan hanya sebagian kecil Penanggung Utang yang melakukan pembayaran/angsuran.
- Sebagian besar piutang negara yang dilakukan pengurusan tidak didukung dengan barang jaminan utang.
- Langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan terus diupayakan ke depan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, antara lain adalah:
- Melakukan penagihan langsung/melalui surat, baik kepada Penanggung Utang/Penjamin Utang untuk penyelesaian piutang negara.
- Meningkatkan/mengoptimalkan tahap pengurusan piutang negara;

Tabel 4. IKU Presentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

K-Three	2.Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	61%	119%	119%	164%	164%	119%	119%	
Capaian	61%	119%	119%	164%	164%	119%	119%	

3. Sasaran Strategis 3: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa merupakan rangkaian layanan publik yang diselenggarakan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka pengelolaan kekayaan negara serta pelaksanaan lelang. Pelayanan ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pengguna jasa, baik instansi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, dengan mengedepankan prinsip kemudahan, kepastian hukum, efisiensi, dan kualitas layanan yang berkelanjutan.

6) Kode 3a-CP Indeks edukasi dan komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN

dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan stakeholders dan internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

Adapun capaian IKU Indeks edukasi dan komunikasi :

Tabel 5. IKU Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

K-Three	3.Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-CP Efektivitas Edukasi dan Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	MAX/AVG
Realisasi	87	89	89	116,67	140	128	128	
Capaian	117	120	120	120	120	120	120	

7) Kode 3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Komponen yang diukur antara lain:

- a. Persyaratan
- b. Sistem, Mekanisme, Prosedur
- c. Waktu Penyelesaian
- d. Biaya/Tarif
- e. Produk Layanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Sarana Prasarana
- i. Sarana Pengaduan

Adapun capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan:

Tabel 6. IKU Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

K-Three	3.Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3b-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	MAX/AVG
Realisasi	97.5	94	94	93	93	98	98	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

4. Sasaran Strategis 4: Penerapan tata Kelola aset yang efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam Siklus BMN, diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara dikatakan efektif apabila penerapan pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik, tunduk pada peraturan yang berlaku, dan memberikan hasil/outcome yang tepat guna dalam pencapaian tujuan organisasi.

8) IKU 4.1: Presentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang clean and clear (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang not clean but clear (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang not clean and not clear (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4). IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas, untuk outputnya dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN Hulu Migas mempunyai karakteristik khusus terkait dengan SHP harus atas nama Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. disamping itu Pengguna Barang adalah Menteri ESDM, Kuasa Pengguna Barang adalah SKK Migas, sedangkan Kontraktor KKKS selaku pelaksana di lapangan". Kegiatan ini bertujuan mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

Adapun capaian IKU Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan

Tabel 7. IKU Presentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan

K-Three	4.Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP Presentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	490%	141%	141%	155%	155%	120,19%	120,19%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

9) Kode 4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalui Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasinya di tahun 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aset BMN dan memperbaiki struktur portofolio aset.

Adapun capaian IKU Persentase evaluasi kinerja BMN

Tabel 8. Presentase evaluasi kinerja BMN

K-Three	4.Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b-CP Presentase evaluasi kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	104%	102%	102%	139%	139%	120%	120%	
Capaian	104%	102%	102%	120%	120%	120%	120%	

5. Sasaran Strategis 5: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan lelang yang professional dan produktif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dibidang piutang negara, penilaian dan lelang. Penerapan tata kelola piutang negara, pelayanan penilaian dan pelaksanaan lelang dikatakan efektif apabila pelaksanaan pengelolaan piutang negara, pelayanan penilaian serta pelayanan lelang yang dilaksanakan dapat sesuai dengan prinsip dan

kaidah tata kelola yang baik (good governance), tunduk pada peraturan yang berlaku, dan memberikan hasil/outcome yang tepat guna dalam pencapaian tujuan organisasi.

10) Kode 5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Saldo awal BKPN KPKNL Banjarmasin dengan target 15 BKPN dengan penyelesaian BKPN sebanyak 16 BKPN dengan capaian 118%. Tantangan pencapaian IKU ini adalah rendahnya jumlah penyerahan BKPN baru, dihadapi dengan melakukan langkah-langkah, antara lain:

- melakukan penggalian potensi Piutang daerah baik secara langsung kepada pemda setempat maupun secara tertulis dengan surat yang ditujukan langsung kepada instansi satuan kerja perangkat daerah;
- melakukan pengumpulan data awal potensi Piutang daerah maupun Piutang K/L dengan bekerjasama dengan Kanwil Perbendaharaan untuk memperoleh data awal Piutang KL maupun Pemda.

Adapun capaian IKU Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

Tabel 9. IKU Realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

K-Three	5.Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	170%	112%	112%	123%	123%	118%	118%	
Capaian	120%	112%	112%	120%	120%	118%	118%	

11) Kode 5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN. Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil

Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal akan sangat dipengaruhi norma waktu pelayanan penilaian, akurasi data pelayanan penilaian, dan nilai kaji ulang laporan penilaian. Adapun capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian adalah 108,30% dari target 70%, dengan Indeks Realisasi adalah 120%. Capaian ini diperoleh dari Komponen Norma waktu penilaian (40%), Komponen Akurasi Data Layanan Penilaian (30%) dan Komponen Nilai Hasil Kaji Ulang (30%), dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 10. IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

K-Three	5.Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	MAX/TLK
Realisasi	157%	149%	149%	149%	149%	150%	150%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

12) IKU 5.3: Presentase Produktivitas Lelang

Persentase Produktivitas Lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Target persentase produktivitas lelang KPKNL Banjarmasin pada tahun 2025 sebesar 80% dengan realisasi sebesar 133,10% diperoleh dari perhitungan indeks laku per jenis lelang 114,60% dan indeks frekuensi lelang 145,43%. Tantangan produktivitas lelang eksekusi yang rendah atau masih cukup banyak lelang yang Tidak Ada Peminat (TAP), terutama lelang eksekusi hak tanggungan, dihadapi dengan melakukan langkah-langkah, antara lain

- Melakukan koordinasi dengan para pemohon lelang untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial untuk laku dan nilainya cukup besar dan menetapkan nilai limit lelang secara bertahap sampai ke nilai likuidasi.
- Melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholder dengan objek lelang yang potensial laku, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Kejaksaan, lelang BMN dan BMD, serta lelang sukarela (termasuk lelang produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM).
- Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan pemasaran objek lelang.
- Meningkatkan publikasi lelang melalui e-Auction, media koran, media sosial, dan laman resmi KPKNL Banjarmasin.

Tabel 11. IKU Presentase produktivitas lelang

K-Three	5.Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP Presentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	MAX/TLK
Realisasi	199%	192%	192%	148%	148%	147%	147%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

6. Sasaran Strategis 6: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif.

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Uraian capaian untuk masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut:

13) Kode 6a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup nilai evaluasi kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional. Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banjarmasin tahun 2025 adalah sebesar 120 dari target 100. Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini, antara lain adalah:

- Kurangnya konsistensi Rencana Pencairan Dana (RPD) dengan realisasi RPD.

- Realisasi anggaran yang tinggi, sehingga kurangnya nilai efisiensi Langkah yang diambil KPKNL untuk pencapaian IKU ini antara lain:
- Melakukan pemilihan skala prioritas terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun, dengan tetap memperhatikan capaian output terkait.
- Selalu monitoring dan memastikan indikator capaian IKPA dan SMART DJA terpenuhi.
- Memperhatikan hal yang mempengaruhi nilai indikator capaian IKPA dan SMART DJA.
- Melaksanakan penganggaran dengan pruden.
- Penghematan dilakukan setiap akan digunakannya DIPA secara seksama dan selektif.
- Menyusun RPD yang akurat dan disesuaikan dengan rencana.
- Konsisten dalam melaksanakan RPD.

Adapun capaian IKU dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12. IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

K-Three	6.Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

14) Kode 6b-N Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa

Meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan/DJKN/KPKNL. Indeks ini mengukur Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri) dan Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang pengadaan Barang dan Jasa dan peraturan Kepala LKPP.

Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banjarmasin tahun 2025 adalah sebesar 100 dari target 100.

Tantangan pengadaan barang dan jasa :

- Perubahan regulasi yang dinamis, seperti penyesuaian Perpres PBJ dan aturan turunan, menuntut adaptasi cepat dari pelaksana pengadaan.
- Penafsiran regulasi yang beragam antar pemangku kepentingan dapat menimbulkan perbedaan implementasi dan potensi sengketa.

- Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengadaan, khususnya pejabat fungsional pengelola PBJ
- Kendala teknis pada sistem pengadaan elektronik (SPSE), seperti gangguan system, aktu proses pengadaan yang terbatas dan kurangnya kesiapan atau ketersediaan penyedia/barang/jasa.

Kendala pengadaan barang dan jasa :

- Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat faktor penyedia atau kondisi eksternal.
- Kualitas barang/jasa yang tidak sesuai kontrak.

Indikator kinerja pengadaan yang belum terukur secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran indikator kinerja pengadaan yang belum terukur secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran. Adapun rincian realisasi IKU sebagai berikut:

Tabel 13. IKU Indeks Tata Kelola pengadaan barang dan jasa

K-Three	6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-N Indeks Tata Kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	120	120	120	110	110	110	110	
Capaian	120	120	120	110	110	110	110	

15) Kode 6c-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Organisasi dan SDM merupakan modal dasar yang dibutuhkan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menciptakan ekosistem kerja yang kondusif. SDM yang berkompentensi tinggi merupakan modal organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Realisasi Persentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2025 adalah sebesar 121,5%. Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0%. IKU ini dimaksudkan untuk mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Tantangan atau hambatan pada pencapaian IKU ini adalah masih terdapat pegawai yang tidak mengusulkan pelatihan secara mandiri, sehingga kemungkinan dipanggil pelatihan

menjadi kecil. Hal ini dihadapi dengan mengimbau pegawai untuk aktif dalam mengajukan usulan diklat serta melakukan sosialisasi dan edukasi berkala terhadap pegawai melalui nota dinas, broadcast whatsapp ataupun sosialisasi secara langsung. Adapun rincian realisasi IKU sebagai berikut:

Tabel 14. IKU Presentase pengembangan kompetensi pegawai

K-Three	6.Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6c-N Presentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	MAX/TLK
Realisasi	113%	91%	91%	143%	143%	123%	123%	
Capaian	113%	91%	91%	120%	120%	120%	120%	

7. Sasaran Strategis 7: Penanganan Hukum dan komunikasi publik yang efektif

Terlaksananya penanganan permasalahan hukum yang optimal serta terselesaikannya permasalahan di bidang hukum yang dihadapi oleh unit organisasi beserta aparatur di dalamnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi. Selanjutnya untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan stakeholders dan internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

16) Kode 7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), dan
- Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)

Pada Tahun 2025, capaian IKU dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

K-Three	7.Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	113,63	114,1	114,1	112,74	112,74	112,18	113,27	
Capaian	113,63	114,1	114,1	112,74	112,74	112,18	113,27	

17) Kode 7b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Informasi publik adalah informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Keuangan selaku badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Permohonan informasi publik dari pemohon informasi wajib untuk disampaikan dan ditindaklanjuti sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022, di mana waktu penetapan kapan penghitungan dimulai apabila nomor register telah diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Adapun target IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik KPKNL Banjarmasin tahun 2025 adalah 80 sedangkan realisasi penyelesaiannya adalah 153,44 dengan Indeks 120.

Seksi Hukum dan Informasi telah mengupayakan pemberian layanan informasi yang memudahkan para pengguna, seperti :

- 1) Penyediaan form permintaan informasi publik pada Area Pelayanan Terpadu (APT), APT Online maupun pada website.
- 2) Pencatuman daftar informasi publik yang wajib diumumkan, serta merta dan berkala pada website kantor
- 3) Penyetoran link proses alur PPID serta form pengajuan layanan informasi public
- 4) Menetapkan SK Tim PPID Tk. III
- 5) Memberikan tanggapan atas permohonan dari pihak eksternal
- 6) Penyampaian Laporan PPID KPKNL Bontang berkala setiap tahunnya

Langkah -langkah KPKNL Banjarmasin dalam mencapai target IKU ini adalah:

- melakukan pemutakhiran daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada website KPKNL Banjarmasin;
- membuat laporan PPID secara tepat waktu.

Tabel 16. IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

K-Three	7.Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/AVG
Realisasi	115	110	110	116	116	122,75	122,75	
Capaian	115	110	110	116	116	120	120	

8. Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Pengawasan dan pengendalian internal bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance).

18) Kode 8a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko

Manajemen Risiko bertujuan dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

Tabel 17. IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

K-Three	8.Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP

Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/TLK
Realisasi	99,55	96,19	96,19	97,16	97,16	121,5	121,5	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

19) Kode 8b-N Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Selanjutnya salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tabel 18. IKU Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

K-Three	8.Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	110,40	110,40	
Capaian	100	100	100	100	100	110,40	110,40	

C. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Banjarmasin , pada tahun 2024 KPKNL Banjarmasin telah mendapat alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 4.282.730.000,00. Dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 3.564.358.936,00 atau 93,98% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19. Laporan Pagu Dana Per Jenis Belanja Berdasarkan Online Monitoring SPAN Per 31 Desember 2025

No	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi Top Up (Rp)	Pagu Blokir (Rp)	Pagu Revisi Final (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja pegawai	0	0	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	2.518.647.000	2.593.918.000	308.732.000	2.285.186.000	2.202.056.959	96,36%
3.	Belanja Modal	1.505.788.000	1.688.812.000	255.992.000	1.432.820.000	1.427.051.587	99,60%
	Jumlah	4.024.435.000	4.282.730.000	564.724.000	3.718.006.000	3.629.108.546	

Pada tahun 2025 ini, perhitungan persentase penyerapan anggaran sama dengan tahun 2025. Perhitungan realisasi IKU terdiri dari komponen persentase

penyerapan anggaran, persentase keluaran riil, efisiensi, dan konsistensi. Adapun perhitungannya adalah:

$$\text{Persentase IKU} = (\text{IKPA} \times 50\%) + (\text{SMART DJA} \times 50\%)$$

Tabel 20. IKPA Berdasarkan Online Monitoring SPAN Per 31 Desember 2025

No	Indikator IKPA	Bobot	Nilai	Capaian
A. Nilai IKPA				
1.	Revisi DIPA	10	100	
2.	Deviasi Hal III DIPA	15	100	
3.	Penyerapan Anggaran	20	100	
4.	Belanja Kontraktual	10	100	100
5.	Penyelesaian Tagihan	10	100	
6.	Pengelolaan UP dan TUP	10	100	
7.	Capaian Output	25	100	
B. Nilai SMART				100
Capaian Tahun 2025				120

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi 2025, KPKNL Banjarmasin mengadopsi prinsip efisiensi sumber daya yang berfokus pada maksimalisasi nilai dengan input yang cerdas. Efisiensi ini tidak sekadar memotong biaya, melainkan mengalihkan sumber daya dari pekerjaan administratif manual yang repetitif menuju aktivitas yang memberikan nilai tambah tinggi melalui digitalisasi sistem. Dengan mengintegrasikan seluruh data aset ke dalam satu pintu (Single Source of Truth), KPKNL Banjarmasin berusaha memangkas birokrasi yang berbelit, menghemat waktu koordinasi, dan mengurangi risiko kesalahan data. Secara paralel, pengembangan kapasitas SDM diarahkan agar setiap pegawai mampu mengoperasikan teknologi terkini secara lincah, sehingga penggunaan anggaran negara untuk operasional kantor dapat ditekan secara signifikan dan dialihkan untuk mendukung program strategis yang lebih berdampak langsung pada pemulihan ekonomi nasional.

E. Kinerja Lain – Lain

Melalui layanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Banjarmasin juga turut memberikan pelayanan dengan rincian sebagai berikut:

1) Penanganan Perkara

No	Nomor Perkara	Tahap Pengadilan
1	26/Pdt.G/2022/PN.Klk	Selesai/Menang
2	112/Pdt.G/2022/PN.Pik	Selesai/Menang
3	52/Pdt.G/2022/PN.Pik	Selesai/Menang
4	2/Pdt.G/2022/PN.Klk	Selesai/Menang
5	205/Pdt.G/2021/PN.Pik	Selesai/Menang
6	52/Pdt.G/2019/PN.Pik	Proses Peninjauan Kembali (PK)
7	48/Pdt.G/2020/PN.Pik	Selesai/Damai
8	246/Pdt.G/2024/PA.Pik	Selesai/Menang
9	217/Pdt.G/2024/PA.Pik	Selesai/Menang
10	47/Pdt.G/2024/PN.Pik	Selesai/Menang
11	145/Pdt.G/2024/PN.Pik	Proses Peradilan Tingkat Pertama (PN)
12	126/Pdt.G/2024/PN.Pik	Proses Peradilan Tingkat Pertama (PN)
13	248/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst	Proses Peradilan Tingkat Pertama (PN)

2) Pelayanan Penilaian

No	Jenis Permohonan Penilaian	Jumlah Laporan
1.	Pemindahtanganan BMN	75
2.	Pemanfaatan BMN	34
3.	Penilaian Barang Sitaan/Rampasan	41
4.	Pemindahtanganan BMD	98
5.	Pemanfaatan BMD	1
6.	Lainnya (LKPP)	5

3) Pelayanan Lelang Eksekusi Wajib Pasl 6 UUHT

PASAL 6 UUHT													
Bulan Ke	Frekuensi Lot Lelang	Frekuensi Lelang			Pokok Lelang	PNBP Lelang						PPh	BPHTB
		Lelang Dengan Kehadiran Peserta	Lelang Tanpa Kehadiran Peserta	Jumlah		Pemohonan	Penjual	Pembeli	Batal	Penerimaan Negara Lainnya	Total		
1	64	-	42	42	27.033.645.500	20.100.000	540.672.910	540.672.910	250.000	-	1.101.695.820	675.841.138	533.167.250
2	125	-	96	96	4.494.250.000	18.750.000	59.855.000	59.855.000	750.000	-	199.270.000	112.356.250	165.238.000
3	128	-	83	83	11.279.880.000	32.100.000	225.593.800	225.593.800	4.000.000	-	487.287.200	281.992.000	125.875.000
4	128	-	90	90	9.510.850.000	23.550.000	190.213.000	190.213.000	500.000	-	404.476.000	237.766.250	305.871.000
5	127	-	86	86	11.196.440.000	19.950.000	223.928.800	223.928.800	2.000.000	-	469.807.600	279.911.000	1.607.382.550
6	144	-	105	105	13.912.575.000	26.550.000	278.251.500	278.251.500	3.250.000	-	586.303.000	347.814.375	389.907.000
7	191	-	137	137	8.571.309.000	26.700.000	171.426.180	171.426.180	2.500.000	-	372.052.360	214.282.725	379.489.044
8	201	-	137	137	12.007.955.000	27.450.000	240.159.100	240.159.100	2.000.000	-	509.768.200	300.198.875	361.718.034
9	223	-	168	168	8.865.045.000	36.000.000	177.300.900	177.300.900	1.500.000	-	392.101.800	221.626.125	458.132.750
10	232	-	177	177	23.828.127.000	31.800.000	476.562.540	476.562.540	1.750.000	-	986.675.080	595.703.175	501.402.250
11	250	-	178	178	8.867.426.000	27.300.000	177.348.520	177.348.520	4.500.000	-	386.497.040	221.685.650	1.030.336.923
12	250	-	160	160	18.655.565.000	25.650.000	373.111.300	373.111.300	3.750.000	-	775.622.600	466.389.125	167.985.400
Total	2.063	-	1.459	1.459	108.222.667.500	315.900.000	3.164.453.350	3.164.453.350	26.750.000	-	6.671.556.700	3.955.566.688	6.026.305.201

Atas kinerja kinerja lain yang diberikan oleh KPKNL kepada seluruh pemangku kepentingan baik instansi kementerian/lembaga negara maupun masyarakat. Atas seluruh kinerja lain yang diberikan KPKNL Banjarmasin dibuktikan dengan survei kepuasan layanan sesuai dengan data yang disebutkan pada poin-poin diatas.

F. Penghargaan

Pada Tahun 2025, KPKNL Banjarmasin menerima berbagai penghargaan sebagai dengan berbagai kategori dan pemberi penghargaan. Berikut beberapa piagam penghargaan yang didapatkan KPKNL Banjarmasin selama periode T.A. 2025.

Gambar 3. Sertifikat Penghargaan KPKNL









Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja KPKNL Banjarmasin tahun 2025 yang telah disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Banjarmasin sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintah. Penyusunan laporan kerja untuk mengetahui apakah kinerja yang telah dilaksanakan sudah mencapai hasil yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan karena capaian yang hendak dicapai telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dan dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. KPKNL Banjarmasin telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi yang sangat fluktuatif, tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan, namun demikian, KPKNL Banjarmasin senantiasa berusaha mengatasi tantangan tersebut sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan dengan optimal. **Hal ini tercermin dari pencapaian IKU pada tahun 2025 yang sangat baik dan secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Banjarmasin mencapai 112,08%.**

B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang

Dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Banjarmasin mempunyai beberapa strategi, antara lain:

1. Meningkatkan persepsi masyarakat dan *stakeholder* lelang melalui sosialisasi untuk mendorong pemahaman terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang menghasilkan harga yang optimal;
2. Mengoptimalkan penyelesaian piutang negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi data hutang dengan penanggung hutang dalam rangka peningkatan kualitas data dalam upaya menunjang penyelesaian piutang negara serta percepatan pengurusan Piutang Negara;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan latihan, peningkatan kualitas perencanaan pekerjaan, dan melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah dijadwalkan dalam rangka mengatasi beban kerja yang ada dan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2025, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan di Kementerian Keuangan sebagai bahan acuan pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan rencana strategis maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Banjarmasin. Laporan Kinerja tahun 2025 kiranya dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja KPKNL Banjarmasin pada periode berikutnya.



Lampiran



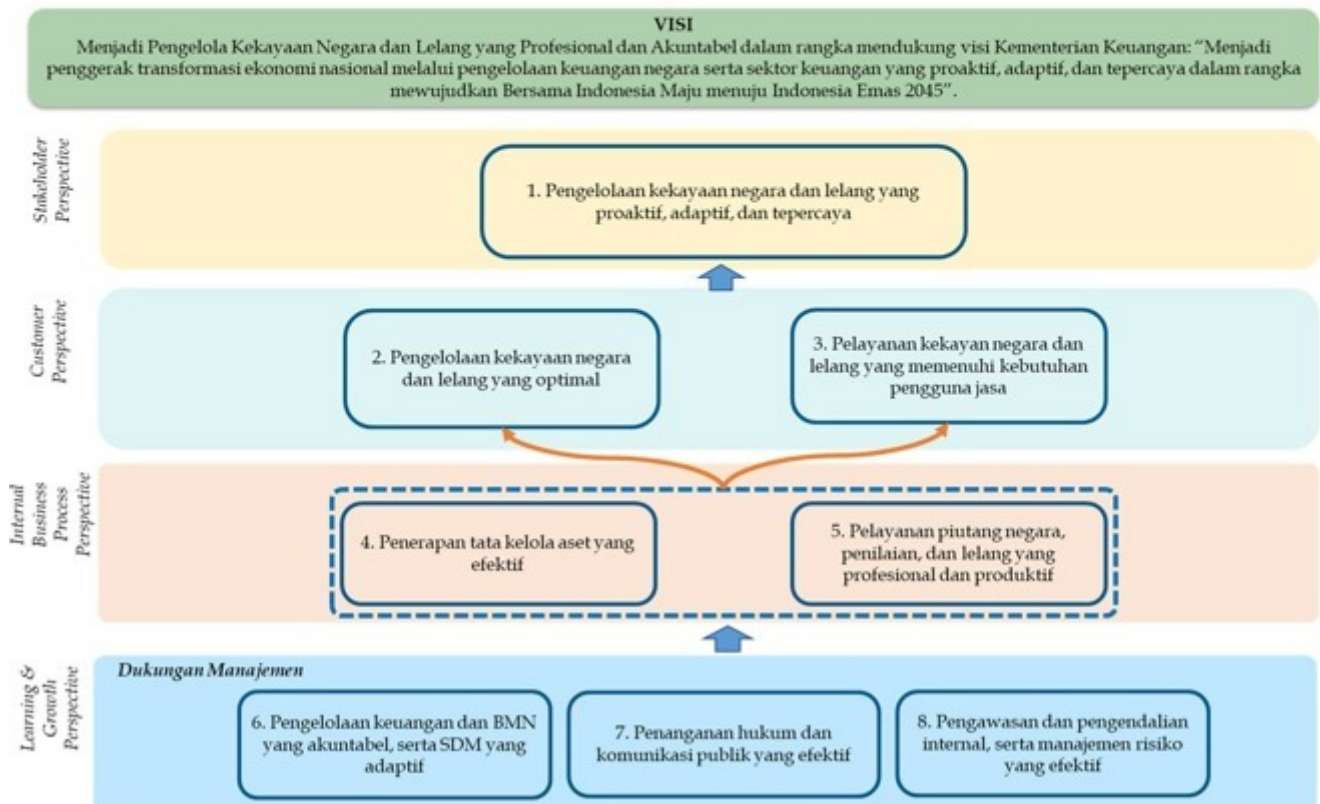
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-03/WKN.12/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BANJARMASIN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BANJARMASIN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp31,6 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp325,9 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,1 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Program/Kegiatan 2025

Program:

Anggaran



Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Kegiatan	Rp631,200,000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp84,584,000
2. Pengelolaan Aset	Rp546,616,000
Program:	
Dukungan Manajemen Kegiatan	Rp3,393,235,000
1. Legalisasi dan Litigasi	Rp21,100,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp3,323,329,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp35,310,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp13,496,000

Kota Banjarmasin, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan
Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik
Kusumawardhani

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Banjarmasin



Ditandatangani Secara Elektronik
Agus Hari Widodo



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BANJARMASIN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp31,6 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp325,9 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,1 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Kota Banjarmasin, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Banjarmasin



Ditandatangani Secara Elektronik
Agus Hari Widodo



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kota Banjarmasin, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banjarmasin



Ditandatangani Secara Elektronik
Agus Hari Widodo



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Agus Hari Widodo		NAMA	Kusumawardhani
NIP	19690121 199603 1 002		NIP	19690823 199603 2 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banjarmasin		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banjarmasin		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp31,6 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp325,9 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,1 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



	kebutuhan pengguna jasa			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kota Banjarmasin, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Kusumawardhani
19690823 199603 2 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Agus Hari Widodo
19690121 199603 1 002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	33 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp31,6 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp325,9 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,1 M)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74



3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI

Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kota Banjarmasin, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Kusumawardhani

19690823 199603 2 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Agus Hari Widodo

19690121 199603 1 002





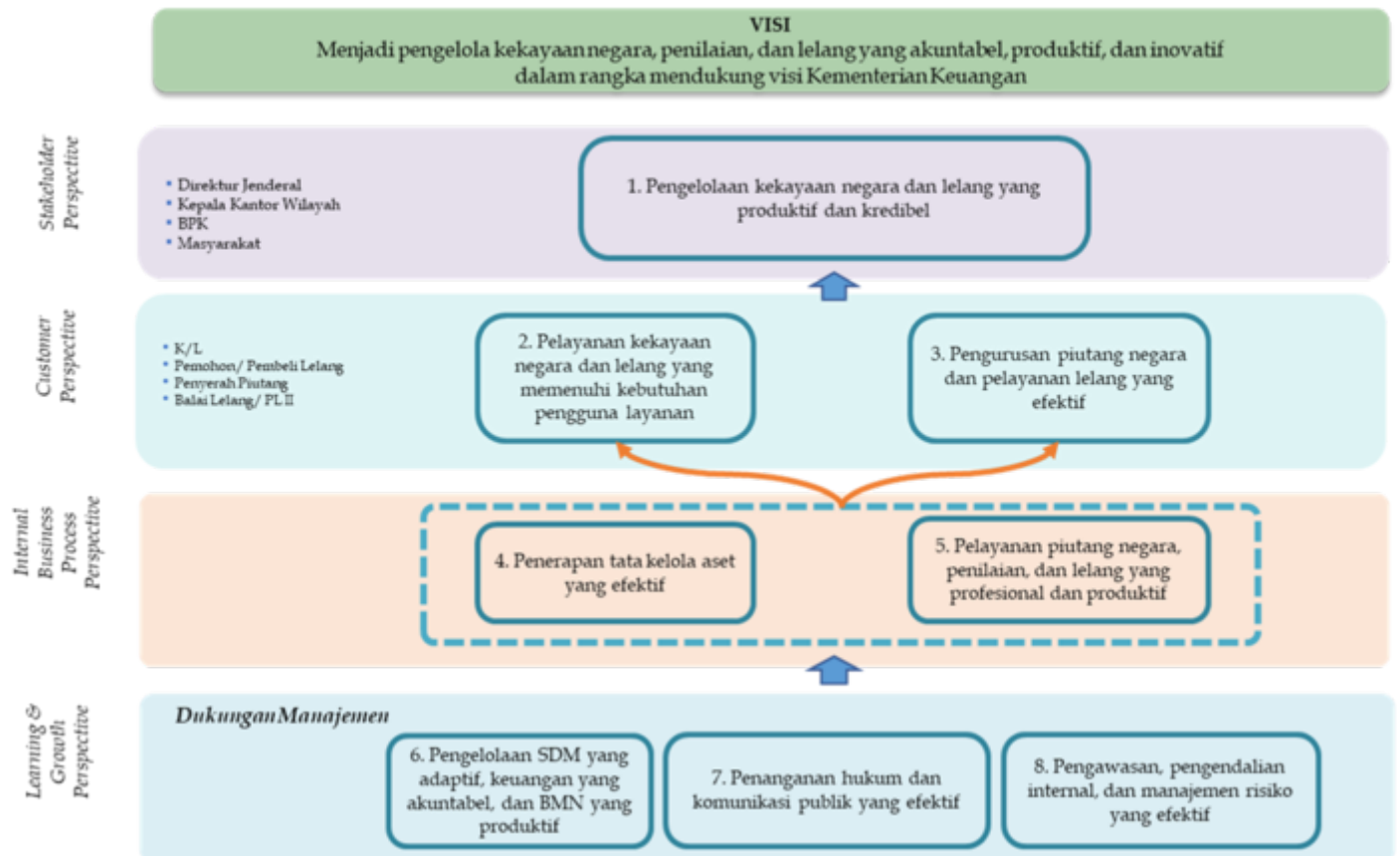
**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-03/WKN.12/2026
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BANJARMASIN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BANJARMASIN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp 27,4 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp 133,8 Juta)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp 185 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

Program/Kegiatan 2026

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Anggaran

Rp932,882,000



Kegiatan

- | | |
|---|---------------|
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp351,849,000 |
| 2. Pengelolaan Aset | Rp581,033,000 |

Program:

Dukungan Manajemen	Rp1,951,802,000
--------------------	-----------------

Kegiatan

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Legislasi dan Litigasi | Rp24,424,000 |
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp1,871,256,000 |
| 3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik | Rp43,067,000 |
| 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp13,055,000 |

Banjarmasin, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan
Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik
Tetik Fajar Ruwandari

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Banjarmasin



Ditandatangani Secara Elektronik
Fatchur Berlianto



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BANJARMASIN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel							
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 27,4 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan							
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5	30	30	60	60	100	100
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif							
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 133,8 Juta)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 185 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	lelang							
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

Banjarmasin, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Banjarmasin



Ditandatangani Secara Elektronik
Fatchur Berlianto



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Banjarmasin, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banjarmasin



Ditandatangani Secara Elektronik
Fatchur Berlianto



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Fatchur Berlianto		NAMA	Tetik Fajar Ruwandari
NIP	19751027 199903 1 001		NIP	19760822 199503 2 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banjarmasin		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banjarmasin		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp 27,4 M)	Penerima Layanan
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pembinaan	80%	Penerima Layanan
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp 133,8 Juta)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp 185 M)	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	85%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan kearsipan	80	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks integritas organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Banjarmasin, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Fatchur Berlianto

19751027 199903 1 001



Ditandatangani Secara Elektronik

Tetik Fajar Ruwandari

19760822 199503 2 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	36 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 27,4 M)
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5	30	30	60	60	100	100
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 133,8 Juta)



3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp 185 M)
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%	
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100	
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80	
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80	
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80	
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100	
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83	



KONSEKUENSI	
	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Banjarmasin, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Fatchur Berlianto
19751027 199903 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Tetik Fajar Ruwandari
19760822 199503 2 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



FOTO KPKNL BANJARMASIN







Silaturahmi & Sinergi
KPKNL Banjarmasin dengan RRI Banjarmasin

KAJASASTENAGA 0811510700

STANDAR PELAYANAN
pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
"Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang"
Tanpa dipungut biaya

Walaupun Klien/Konsumen
Nomor: 004/01/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan DJKN

KAJASASTENAGA 0811510700

STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
"PENERBITAN SALINAN RISALAH LELANG"
Tanpa dipungut biaya

Walaupun Klien/Konsumen
Nomor: 004/01/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan DJKN

KAJASASTENAGA 0811510700

Sertifikasi BMN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan BMN Berupa Tanah

KAJASASTENAGA 0811510700

Rangkaian Perlombaan
Mengperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

KAJASASTENAGA 0811510700

Optimalisasi BMN
Meningkatkan Program Kerja Subunit Merah Putih dan Sekolah Rakyat

KAJASASTENAGA 0811510700

Sertifikasi BMN
Upaya Amankan Aset Negara

KAJASASTENAGA 0811510700

Survei Kepuasan Masyarakat
Tahun 2023

94,00
SANGAT BAIK

Yah Lelang Terbanyak 9 Tahun 2023 - Nona sa Khasanah sa Lelang Tertinggi pada an 2023 - Yosef

KAJASASTENAGA 0811510700

Penerima Penghargaan

KAJASASTENAGA 0811510700

FKP WEBINAR LELANG
Lelang Tuntas Layanan Berintegritas

KAJASASTENAGA 0811510700

BEDA DITJEN PERBANK

Ditjen Perbendaharaan Ditjen Kekayaan Negara

KAJASASTENAGA 0811510700

Lelang Melesat!
DJKN Cetak Capaian Gemilang di 2024

KAJASASTENAGA 0811510700

Perubahan Jam Layanan
selama Bulan Ramadhan
Senin - Jumat
08.00-15.00

KAJASASTENAGA 0811510700

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa
1446 H

KAJASASTENAGA 0811510700

Maklumat Pelayanan
Pada KPKNL Banjarmasin
SERVICE

KAJASASTENAGA 0811510700

STOP GRATIFIKASI!

KAJASASTENAGA 0811510700

Rumah Rp200 jutaan?
Risa - lelang.go.id solusinya!

KAJASASTENAGA 0811510700

Lelang.go.id

KAJASASTENAGA 0811510700

KAJASASTENAGA 0811510700



DETAIL INDIKATOR KINERJA DETAIL CAPAIAN RO

No.	Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Status Konfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
1	537958	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN	045	12	CD	4798	AAH	001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	157,743,000	134,989,019	P	200	SuratKeputusan	552	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	200	200	100
2	537958	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN	045	12	CD	4798	AAH	002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	50,870,000	48,000,890	N	12	SuratKeputusan	107	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	12	12	100
3	537958	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN	045	12	CD	4798	ABA	002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	44,120,000	43,694,000	N	454	RekomendasiKebijakan	547	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	454	454	100
4	537958	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN	045	12	CD	4796	AEF	001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	54,421,000	15,350,568	P	50	orang	50	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	50	50	100
5	537958	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN	045	12	CD	4796	AEF	002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	26,331,000	3,505,000	P	50	orang	50	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	50	50	100
6	537958	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN	045	12	CD	4796	AEF	003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	3,832,000	500,000	P	50	orang	50	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	50	50	100
7	537958	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN	045	12	CD	4798	BAH	001	Risalah Lelang	33,311,000	29,958,000	N	400	dokumen	631	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	400	400	100
8	537958	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN	045	12	CD	4798	FAE	004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	18,252,000	14,601,600	N	1	Rekomendasi	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	1	1	100
9	537958	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN	045	12	CD	4798	FAE	005	Rekomendasi Hasil Penilaian	16,800,000	11,147,000	P	2	Rekomendasi	2	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	2	2	100



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN

10	537958	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN	045	12	CD	4798	FAE	007	Penggalan Potensi Lelang	40,298,000	16,521,000	P	2	Rekomendasi	6	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	2	2	100
11	537958	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN	045	12	CD	4798	FAK	001	Aset BUN yang Dikelola	100,871,000	93,131,500	N	18	Aset	18	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	18	18	100
12	537958	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN	045	12	CD	4798	UAE	201	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	17,452,000	14,412,500	P	154	Rekomendasi	244	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	154	154	100
13	537958	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN	045	12	WA	4702	BMB	001	Pembinaan/Edukasi Publik	20,180,000	900,000	P	3	Orang	100	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	3	3	100
14	537958	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN	045	12	WA	4702	BMB	002	Kehumasan	15,130,000	4,398,000	P	26	kegiatan	26	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	26	26	100
15	537958	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN	045	12	WA	4701	EBA	002	Kerumahtanggaan	236,475,000	189,156,488	P	12	Layanan	12	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	2	Maximize	Stabilized	12	12	100
16	537958	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN	045	12	WA	4700	EBA	969	Layanan Bantuan Hukum	21,100,000	18,317,972	P	20	Layanan	113	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	20	20	100
17	537958	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN	045	12	WA	4701	EBA	994	Layanan Perkantoran	1,723,236,000	1,557,463,116	P	12	Layanan	12	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	2	Maximize	Stabilized	12	12	100
18	537958	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN	045	12	WA	4701	EBB	001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	863,212,000	606,907,682	P	89	Unit	89	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	1	Maximize	Time Efficiency	89	89	100
19	537958	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN	045	12	WA	4701	EBB	003	Kendaraan Bermotor	825,600,000	820,143,905	N	3	Unit	3	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	1	Maximize	Time Efficiency	3	3	100



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN

20	537958	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN	045	12	WA	4704	EBD	001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	13,496,000	6,010,306	P	5	Dokumen	6	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	5	5	100
Total Nilai																							2,000.00		
Jumlah Output																							20		



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA